



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 050 / 1312 / 2019

TENTANG

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2020

**PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar program dan kegiatan tahunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021;
- 25) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- 26) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- 27) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Pasal 2

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi, Uraian dan Rincian Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Jaya
pada tanggal, 16 Juli 2019

**KEPALA DINAS PMPTSP KABUPATEN PEMALANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651104 199403 1 008

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	44
BAB III	45
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	47
BAB IV	50
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V	64
PENUTUP.....	64

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas
PMPTSP Kabupaten Pemalang
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan atas penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal.

Perencanaan Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Berhasil tidaknya proses pembangunan tergantung pada sejauh mana kualitas perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang

memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berfungsi sebagai penjabaran RPJP Daerah dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja OPD setiap tahun anggaran.

Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun 2 dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis SKPD untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 tahun.

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Pematang Jaya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. **Visi : “TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.**
- b. **Misi :**
 - 1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
 - 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
 - 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
 - 4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
 - 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
 - 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
 - 7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya harus dapat menjabarkannya dalam Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah..

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun

- 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021;
- 26) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- 27) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- 28) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Bahwa maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah untuk menyusun arah dan kebijakan SKPD pada Tahun Anggaran 2020 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang 2016-2021.

Dimana arah dan kebijakan SKPD harus dapat dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 yang disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diampunya. Prioritas Program dan kegiatan tersebut nantinya menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2020 guna dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Renstra SKPD guna melaksanakan tugas

dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020.

- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dibidang Penanaman Modal, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dapat tercapai.
- c. Mengendalikan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan pelayanan perijinan secara terpadu pada Tahun 2020.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para stakeholders di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2020 guna menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama Tahun 2019 bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 guna mencapai tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan awal SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dalam Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang merupakan embrio berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dimana dalam Tahun Anggaran 2018 yang lalu memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 4.767.350.000,00 dan mendapat tambahan anggaran melalui Anggaran Perubahan (DPPA) Rp. 869.199.200,00 sehingga total pagu anggaran yang APBD yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 5.632.549.200,00 yang tersebar dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.699.040.000,00
- Belanja Langsung Rp. 2.933.509.200,00

Anggaran yang diterima tersebut diupayakan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu guna memenuhi tuntutan masyarakat tentang pelayanan perijinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana yang disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019 (Triwulan II) sebagaimana tertuang dalam tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel II.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019 (Triwulan II)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Tahun 2019)	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2019)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian Raelisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11= (10/4)	
2	Tersusnya Laporan Keuangan Akhir Tahun										
2.12	Bidang Penanaman Modal										
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Terkirim dengan baik	0.75	100	100	554,5	5.54	100	754,5	1,006
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan gedung kantor setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00

01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik yang mencukupi setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/peraturan perundang-undangan yang memadai setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman setiap bulan	1,00	100	100	100	1.00	100	300	300
01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksanakannya koordinasi dan rapat-rapat koordinasi di luar daerah	0.75	100	100	215,00	2.15	100	415,00	553,3
01	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya jasa keamanan dengan baik setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
01	20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi pendampingan setiap bulan	0,29	100	100	97,24	0.97	100	202	696,5
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor										
02	07	Pngadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah Perlengkapan Kantor	0.00	100	100	100	1.00	100	300	-
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Jumlah Peralatan Kantor	0.00	100	100	100	1.00	100	300	-
02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Jumlah Mebeleur	0.00	100	100	107,41	1.07	100	307,41	-
02	11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Tersedianya jumlah komputer dan perlengkapannya	0.00	100	100	100	1.00	100	300	-
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dengan baik setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dengan baik setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur dengan baik setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00

02	30	Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Perlengkapannya	Terpeliharanya komputer dan perlengkapannya dengan baik setiap bulan	0.50	100	100	100	1.00	100	300	600.00
02	37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembantas lingkungan kntr	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan baik setiap bulan	0.50	100	100	100	0.00	100	100	200.00
02	45	Pemeliharaan rutin/berkala Software dan Sistem Informasi	Terpeliharanya software dan sistem informasi dengan baik	0.50	100	100	150,00	1,50	100	350	700
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
05	05	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana sosialisasi pelayanan perijinan	2.0	100	100	175	1.75	100	375	187,5
05	04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi	1.00	100	100	100	1.00	100	300	300.00
06 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											
06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	100	100	2,00	1.00	100	202	202
09 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD											
09	02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	0.23	100	100	131,82	1.31	100	331,82	1,442
15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi											
15	01	Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan usaha kecil menengah	Terfasilitasinya kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil menengah	2,00	100	100	2,00	1.00	100	202	101
15	02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersusunya potensi unggulan di daerah	1,00	100	100	2,00	1.00	100	202	202
15	05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	1,00	100	100	121,43	1,21	100	321,43	321,43
15	07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah	Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur	1,00	100	100	100	1.00	100	300	300
15	08	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan	Terlaksananya pemantauan pembinaan dan pengawasan	1,00	100	100	136,0	1.36	100	336,00	336,00
15	10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terselenggaranya pameran investasi	1,00	100	100	2,00	1.00	100	202	202
15	11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan perijinan	1,00	100	100	170,0	1,70	100	370,00	370,00

16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
16	06	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan	1,00	100	100	191,00	1,91	100	391,00	391,00
16	09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya monitoring dan evaluasi perijinan	1.00	100	100	-	-	100	300	3.00
18		Program Penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan									
18	01	Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Terselesaikanya permasalahan di bidang investasi dan perijinan	1.00	100	100	190,00	1,91	100	300	3.00

Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berjalan (keadaan s/d Bulan Juni 2019) sudah mencapai 54,00 %.

Adapun Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2019 (keadaan s/d Bulan Juni 2019) secara ringkas dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 1.501.037.000,- (50,03%)
- b. Realisasi Belanja Langsung Rp. 1.350.095.271,- (54,00%)

Adapun rincian capaian kinerja Anggaran berjalan tahun 2019 (Keadaan s/d Bulan Juni 2019) adalah sebagaimana Tabel II.2 dibawah ini :

Table : II.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Pendapatan Tahun Berjalan
(s/d Bulan Juni 2019)

Kode Rekening	URAIAN RETRIBUSI	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	KET (SISA KURANG)
1.16.1.20.30.00.00.00 0.4.1.2.03.01	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	3.000.000.000,00	1.500.212.000,00	50,01	(1.499.788.000,00)
1.16.1.20.30.00.00.00 0.4.1.2.03.03	IZIN GANGGUAN/HO	-	825.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN		3.000.000.000,00	1.501.037.000,00	50,03	(1.498.963.000,00)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas Pokok “ Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal”

Sebelum berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang untuk Urusan di Bidang Penanaman Modal di ampu oleh Bappeda Kabupaten Pemalang yang menangani fusi promosi, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pemalang untuk fusi pengendalian dan KPPT Kabupaten Pemalang untuk Fusi Pelayanan Perijinan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya maka sebagai data untuk analisis Kinerja pelayanan SKPD adalah padan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang.

Adapun jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang dalam 2 tahun terakhir Tahun 2017 Sebagaimana tabel II.3, Tahun 2018 sebagaimana tabel II.4 dan Tahun berjalan (Tahun 2019) sebagaimana tabel II.5

Table II.3

Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2017

NO.	NAMA PELAYANAN	2017			
		Pemohon	Terbit	Proses	Tolak
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Prinsip/ Rekomendasi.	128	114	6	4
2.	Izin Lokasi.	9	8	1	0
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB).	242	241	0	10
4.	Izin Gangguan (HO).	477	507	0	3
5.	Izin Usaha Industri (IUI)	11	11	0	0
6.	Tanda Daftar Industri (TDI)	125	125	0	1
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).	872	861	10	1
8.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	954	980	0	2
9.	Izin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.	40	35	5	0
10.	Izan Usaha Pariwisata.	43	43	0	0
11.	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW).	1	1	0	0
12.	Izin Reklame.	522	508	14	0
13.	Tanda Daftar Gudang Dan Ruang (TDG/R).	21	18	3	0
14.	Izin Usaha Perikanan :	11	11	0	0
15.	Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat/Milik.	0	0	0	0
16.	Izin Instalasi Listrik.	0	0	0	0

NO.	NAMA PELAYANAN	2017			
		Pemohon	Terbit	Proses	Tolak
1	2	3	4	5	6
17.	Izin Pesawat Angkat Dan Angkut.	0	0	0	0
18.	Izin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Diesel.	0	0	0	0
19.	Izin Penyalur Petir.	0	0	0	0
20.	Izin Pesawat Lift.	0	0	0	0
21.	Izin Instalasi Kebakaran.	0	0	0	0
22.	Rekomendasi Izin Pendirian Kantor Cabang Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta.	7	5	0	2
23.	Rekomendasi Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain.	1	0	1	0
24.	Surat Izin Operasional Panti.	6	6	0	0
25.	Izin Usaha Angkutan.	5	4	1	0
26.	Izin Usaha Jasa Konstruksi.	67	68	0	0
27.	Izin Pemakaman.	26	25	1	0
28.	Izin Krematorium.	5	5	0	0
29.	Rekomendasi Izin Reklame.	28	17	11	0
30.	Izin Pemakaian Lapangan Sirandu	9	10	0	0
31.	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo.	5	4	1	0
32.	Rekomendasi Izin Unit Transfusi Darah.	1	1	0	0
33.	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.	1	0	1	0
34.	Izin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control).	0	0	0	0
35.	Izin Penyelenggaraan Optikal.	1	1	0	0
36.	Rekomendasi Izin Produksi Air Minum dalam Kemasan.	0	0	0	0
37.	Sertifikasi laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	4	4	0	0
38.	Sertifikasi laik Hygiene Sanitasi Hotel.	0	0	0	0
39.	Sertifikasi laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum.	0	0	0	0
40.	Sertifikasi laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran.	1	1	0	0
41.	Izin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang	0	0	0	0
42.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	121	92	28	1
43.	Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja	1	1	0	0
	JUMLAH	3.749	3.715	80	24

Tabel II.4

Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2018

No	Jenis Ijin	s/d Bulan ini		
		Masuk	Terbit	Ditolak
1	Pendaftaran Penanaman Modal	6	6	0
2	Izin Usaha Penanaman Modal	5	5	0
3	Izin Prinsip	148	135	4
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	244	230	1
5	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	42	41	0
6	Izin Lokasi	5	5	0
7	Izin Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain	0	0	0
8	Izin Produksi Air Minum Dalam Kemasan	0	0	0
9	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	2	2	0
10	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0
11	- Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0
	- Sertifikasi Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	46	46	0
12	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	1	1	0
13	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	4	3	0
14	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	14	14	0
15	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	5	5	0
16	Izin Reklame			
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	824	821	2
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	17	13	3
17	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/P4	2	1	1
	Rekomendasi Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	3	1	1
18	Izin Instalasi Listrik	0	0	0
19	Izin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Disel	0	0	0

20	Izin Penyalur Petir	0	0	0
21	Izin Pesawat Lift	0	0	0
22	Izin Instalasi Kebakaran	0	0	0
23	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	0	0	0
24	Izin Usaha Angkutan	2	2	0
25	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	36	36	0
26	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang	0	0	0
27	Ijin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	65	65	0
28	Ijin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	0	0	0
29	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	1	1	0
30	Tanda Daftar Gudang (TDG)	11	9	0
31	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	704	713	0
32	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	777	777	0
33	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0
34	Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	144	148	0
35	Surat Ijin Operasional Panti	6	6	0
36	Izin Pemakaman	16	16	0
37	Izin Pengabuan Mayat	10	10	0
38	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0
39	Izin Penyelenggaraan Optikal	3	3	0
40	Izin Pendidikan Dasar	0	0	0
41	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	0	0	0
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	3	3	0
42	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0
43	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan			
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	42	40	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	8	8	0

	-Surat Ijin Praktiker Dokter (SIP)	123	102	0
	-Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	352	343	0
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	24	21	0
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	54	50	0
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	54	52	0
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	6	6	0
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	3	3	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	5	5	0
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	4	4	0
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	16	16	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	27	27	0
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	228	219	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	8	8	0
	-Surat izin Kerja Perekam Medis	9	9	0
44	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	1	1	0
45	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I	0	0	0
46	Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan			
	- Izin Apotek (SIA)	0	0	0
	- Izin Toko Obat	23	23	0
	- Izin Toko Alat Kesehatan	3	3	0
47	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (PIRT)	0	0	0
48	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	127	126	0
49	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0
50	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	2	2	0
51	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	0	0
52	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	0	0	0
53	Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman	0	0	0

54	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
55	Izin dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	5	5	0
56	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0
57	Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)			
	1. Izin Pembuangan Limbah Cair	6	6	0
	2. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	7	7	0
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten	0	0	0
58	Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	0	0	0
59	Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	77	77	0
60	Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel dan pabrik	0	0	0
61	Izin Lingkungan	37	37	0
62	Izin Membuka Tanah	0	0	0
63	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	223	220	0
64	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	0	0	0
65	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	64	63	0
66	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
67	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0
68	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada	0	0	0

	lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten			
69	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0
70	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0
71	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0
72	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0
73	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
74	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0
75	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	0	0	0
76	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
77	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
78	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0
79	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
80	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
81	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0
82	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0
83	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0

84	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
85	Izin Insidentil	0	0	0
86	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	14	14	0
	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	29	29	0
87	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
88	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	2907	2907	0
89	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0
90	Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0
91	Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
92	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan			
	Izin Usaha Peternakan	1	1	0
	Tanda Daftar Usaha Peternakan	7	7	0
93	Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	0	0	0
94	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0
95	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	0	0	0
96	Izin Usaha Toko Modern	80	80	0
97	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah	0	0	0
98	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0
	JUMLAH	7.723	7.640	12

Table II.5

Realisasi Pelayanan Perizinan Tahun berjalan (s/d Juni 2019)

No	Jenis Ijin	s/d Bulan ini		
		Masuk	Terbit	Ditolak
1	Izin Prinsip	54	49	1
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	130	134	0
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	45	44	0
4	Izin Lokasi	25	23	0
5	Izin Pendirian Penitipan Anak Dan Kelompok Bermain	0	0	0
6	Izin Produksi Air Minum Dalam Kemasan	0	0	0
7	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga	4	3	0
8	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel	0	0	0
9	Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	0	0	0
	Sertifikasi Laik Sehat Hygiene Sanitasi Depot Air Minum	47	43	0
10	Sertifikasi Laik Hygiene Rumah Makan dan Restoran	0	0	0
11	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional	4	4	0
12	Izin Pemakaian Stadion Sirandu	3	3	0
13	Izin Pemakaian Lapangan Mulyoharjo	4	2	2
14	Izin Reklame			
	-Izin Penyelenggaraan Reklame	213	213	0
	-Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Reklame	7	8	0
15	Rekomendasi Ijin Pendirian Kantor Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)/P4	3	1	1
	Rekomendasi Perusahaan Perekrutan Pekerja Migran Indonesia	0	0	0
16	Izin Instalasi Listrik	0	0	0
17	Izin Pesawat Tenaga Dan Produksi/Disel	0	0	0
18	Izin Penyalur Petir	0	0	0
19	Izin Pesawat Lift	0	0	0
20	Izin Instalasi Kebakaran	0	0	0
21	Izin Pesawat Angkat dan Angkut	0	0	0
22	Izin Usaha Angkutan	5	5	0
23	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	38	38	0
24	Ijin Usaha Pariwisata pada Kawasan Wisata Pantai Widuri Pematang	0	0	0
25	Ijin Usaha Atau Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	13	9	0
26	Ijin Penyelenggaraan Perusahaan Pemberantasan Hama (Pest Control)	0	0	0
27	Ijin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (IPPSBW)	0	0	0
28	Tanda Daftar Gudang (TDG)	6	6	0
29	Izin Usaha Industri (IUI)	36	34	0

30	Surat Ijin Operasional Panti	1	1	0
31	Izin Pemakaman	10	10	0
32	Izin Pengabuan Mayat	10	10	0
33	Rekomendasi Ijin Unit Transfusi Darah	0	0	0
34	Izin Penyelenggaraan Optikal	2	2	0
35	Izin Pendidikan Dasar	0	0	0
36	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	2	2	0
	- Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	4	3	0
37	Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3	0	0
	Izin Operasional Tetap Klinik	5	4	0
38	Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan			
	-Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	33	33	0
	-Surat Ijin Kerja Radiografer (SIKR)	1	1	0
	-Surat Ijin Prakter Dokter (SIP)	97	86	0
	-Surat Izin Kerja Perawat (SIKP)	123	120	0
	-Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	20	21	0
	-Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA)	51	51	0
	-Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	13	17	0
	-Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)	4	4	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)	33	32	0
	-Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	4	4	0
	-Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	0	0	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan	4	4	0
	-Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	36	52	0
	-Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)	21	21	0
	-Surat izin Kerja Perekam Medis	3	3	0
	-Surat izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	4	4	0
39	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	0	0	0
40	Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan Kelas I dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas I	0	0	0
41	Izin Apotek, Toko Obat dan Toko Alat Kesehatan			
	- Izin Apotek (SIA)	32	32	0
	- Izin Toko Obat	1	1	0
	- Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0
42	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (PIRT)	81	71	0
43	Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	0	0	0
44	Izin Pemakaian Alun-alun	0	0	0
45	Izin Pemakaian Taman Patih Sampun	0	0	0
46	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0	0	0
47	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	0	0	0
48	Izin Pembangunan dan Pengembangan	0	0	0

	Permukiman			
49	Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
50	Izin dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	3	3	0
51	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0
52	Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)			
	1. Izin Pembuangan Limbah Cair	1	1	0
	2. Izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)	7	7	0
	3. Izin Pengumpulan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) skala Kabupaten	0	0	0
53	Izin pendaurulangan sampah/ pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	0	0	0
54	Izin Pengesahan dan registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	60	52	0
55	Persetujuan permohonan pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel dan pabrik	0	0	0
56	Izin Lingkungan	9	9	0
57	Izin Membuka Tanah	0	0	0
58	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	68	68	0
59	Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker	0	0	0
60	Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	28	27	0
61	Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
62	Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten	0	0	0
63	Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
64	Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	0	0	0
65	Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten yang bersangkutan	0	0	0
66	Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	0	0	0
67	Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	0	0	0
68	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local	0	0	0
69	Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	0	0	0

70	Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	0	0	0
71	Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
72	Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
73	Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0
74	Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
75	Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal	0	0	0
76	Izin Mendirikan Bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0	0	0
77	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0
78	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	0	0	0
79	Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
80	Izin Insidentil	0	0	0
81	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	8	7	0
82	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	1	0	0
83	Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
84	Izin Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar bersubsidi Untuk Usaha Mikro	1195	1195	0
85	Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	0	0	0
86	Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	4	4	0
87	Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten	0	0	0
88	Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan			
	Izin Usaha Peternakan	3	2	0
	Tanda Daftar Usaha Peternakan Rakyat	6	5	0
89	Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan	0	0	0
90	Izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	0	0	0
91	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	0	0	0
92	Izin Usaha Toko Modern	2	2	0

93	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah	0	0	0
94	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0	0
	JUMLAH	2.630	2.590	4

Sedangkan Realisasi Retribusi selama dua tahun terakhir Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagaimana table II.5

Table II.6
Realisasi Retribusi Dua Tahun Terakhir
(Tahun 2017 dan Tahun 2018)

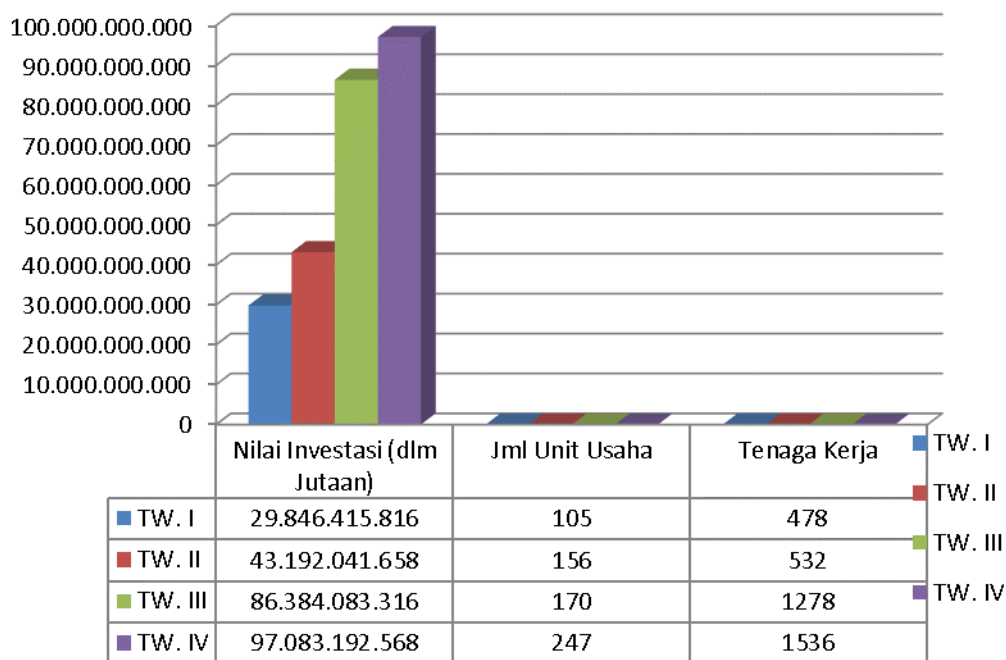
No.	Jenis Perijinan	Retribusi Tahun 2017		Retribusi Tahun 2018		Ket
		Target (Rp.)	realisasi (Rp.)	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1.	IMB	1.650.000.000,00	1.528.756.900,00	2.684.000.000,00	2.702.775.000,00	
2.	Izin Gangguan/ HO dan Lokasi	1.249.710.000,00	781.335.800,00		1.398.000,00	
3.	Izin Usaha Perikanan	4.000.000,00	290.000,00		-	
	Jumlah	2.684.000.000,00	2.310.382.700,00	2.684.000.000,00	2.704.173.000,00	

Selain capaian kinerja pelaksanaan kegiatan maupun keuangan sebagaimana tersebut diatas juga adanya capaian terhadap kinerja SKPD yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel II.7
Realisasi Capaian Indikator Kinerja SKPD Tahun 2018
Yang mengacu Pada Tujuan dan sarana RPJMD
Urusan Penanaman Modal

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target Capaian	Realisasi	Target Capaian	Realisasi
1.	Penanaman Modal					
1	Nilai investasi berskala nasional (PMDN) (rupiah)	Rupiah	734.604.689.677	889.333.659.281	739.604.689.677	542.559.453.625
2	Nilai SKM	IKM	76	82,97	76	-
3	Prosentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	%	100	100	100	100

Adapun untuk nilai investasi skala lokal berdasarkan data realisasi perijinan yang diterbitkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibanding realisasi investasi tahun yang lalu sebagaimana tabel II.7, dimana realisasi investasi di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 sebesar Rp. 889.333.659.281,00 dengan jumlah investor sebanyak 45 investor dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13.146 orang dengan rincian per triwulan sebagaimana tabel II.8



Tabel II.8
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI SKALA LOKAL DI KABUPATEN PEMALANG
LIMA TAHUN TERAKHIR (2015 – 2019)

NO.	TAHUN	NILAI INVESTASI	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA	KETERANGAN
1.	2015	282.199.754.589	925	5.194	
2.	2016	918.803.277.247	943	9.301	
3.	2017	250.608.547.834	783	5.500	
4.	2018	256.505.733.358	678	3.824	
5.	2019	85.076.200.000	5	1.870	

Tabel II.9
REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018 PER TRIWULAN

NO	SEKTOR	TW I			TW II			TW III			TW IV			JUMLAH		
		Jml Unit Usaha/Perusahaan	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Jml Unit Usaha/Perusahaan	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Jml Unit Usaha/Perusahaan	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Jml Unit Usaha/Perusahaan	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)	Jml Unit Usaha/Perusahaan	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja (Orang)
I.	SEKTOR PRIMER															
1	TANAMAN PANGAN & PERKEBUNAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
2	PETERNAKAN	3	720.000.000	9	0	0	0	0	0	0				3	720.000.000	9
3	KEHUTANAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
4	PERIKANAN	1	110.000.000	5	0	0	0	0	0	0				1	110.000.000	5
5	PERTAMBANGAN	3	53.603.000.000	11	1	2.000.000	12	0	0	0				4	55.603.000.000	23
II.	SEKTOR SEKUNDER															
6	INDUSTRI MAKANAN	51	6.035.756.000	237	14	2.000.000	43	7	9.425.000.000	49				72	17.460.756.000	329
7	INDUSTRI TEKSTIL	9	1.400.000.000	153	5	3.515.000.000	1.052	1	150.000.000	2				15	5.065.000.000	1.207
8	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	1	50.000.000	27	0	0	0	0	0	0				1	50.000.000	27
2	INDUSTRI KAYU	2	230.000.000	7	1	50.000.000	3	0	0	0				3	280.000.000	10
10	INDUSTRI KERTAS & PERCETAKAN	1	212.163.000	4	2	105.000.000	4	2	109.500.000	8				5	426.663.000	16
11	INDUSTRI KIMIA & FARMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
12	INDUSTRI KARET & PLASTIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
13	IND. MINERAL NON LOGAM	5	410.000.000	23	2	110.000.000	7	2	370.000.000	7				9	890.000.000	37

Tabel II.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang

No	Indikator	SPM* nasional	IKU (Perbup No.58/2018)	Target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2018	Tahun 2019 TW II	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	729.604.689.677	734.604.689.677	739.604.689.677	744.604.689.677	889.333.659.281	542.559.453.625	744.604.689.677	744.604.689.677	
2	Nilai SKM		Nilai SKM	76	76	76	76	82,97	-	76	76	
3	Persentase pengaduan pelayanan perijina dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani		Persentase pengaduan pelayanan perijina dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejalan dengan semakin meningkatnya pengajuan perizinan dari masyarakat dimana berdasarkan letak geografis Kabupaten Pemalang terdiri dari dataran tinggi di bagian selatan dan dataran rendah/ pantai di bagian utara. Guna untuk memberikan kemudahan pelayanan dan mengakomodir kedua akses tersebut.

Bahwa guna untuk menerapkan pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu, maka akan dilakukan secara bertahap seiring dengan kemampuan SDM dan Sarana/ prasarana pendukung yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul maka perlu dirumuskan kebijakan masing-masing SKPD guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merealisasikan Visi dan Misi SKPD yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kabupaten Pemalang periode Tahun 2016 – 2021.

Dalam merumuskan kebijakan di masing-masing SKPD, perlu dipertimbangkan isu-isu nasional dan global, sehingga terwujud sinergitas strategis antara kebijakan nasional, provinsi, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan SKPD.

Salah satu isu nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. Pelayanan konsultasi

Selain hal tersebut diatas dimana disebutkan bahwa kewajiban penyelenggara pelayanan publik, antara lain:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka permasalahan yang mendesak dan masih perlu diambil tindakan strategis pada lingkup tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang seiring dengan semakin bertambahnya jumlah izin yang ditangani adalah adanya:

- a. Kemampuan kapasitas Sumberdaya Manusia PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang yang masih terbatas.

Upaya – upaya yang akan ditempuh guna untuk mengatasi kurangnya SDM ini adalah:

- 1) Mengirimkan personil Dinas PMPTSP untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi SKPD.
- 2) Melakukan pelatihan tugas pokok dan fungsi dengan mengundang Narasumber.
- 3) Menciptakan koordinasi yang komprehensif dengan berbagai pihak dalam mengatasi keterbatasan SDM dan guna pembuatan bahan kebijakan.

- b. Pemenuhan terhadap Sarana dan prasarana secara lengkap untuk penunjang pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti.

Upaya – upaya yang akan ditempuh guna untuk mengatasi kekurangan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan adalah:

- 1) Pengadaan Mobil Layanan Perijinan keliling, guna untuk melayani perijinan secara langsung kepada masyarakat.

- 2) Peningkatan Teknologi informasi dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen perizinan terpadu (SIMDU) guna untuk memperlancar pelayanan perizinan.
 - 3) Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor guna mendukung pelayanan perijinan.
 - 4) Pengadaan Komputer dan perlengkapannya guna mendukung proses pelayanan perijinan.
 - 5) Pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat.
- c. Kajian dan penyusunan terhadap produk-produk hukum yang sudah kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan regulasi tingkat atas yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

Upaya – upaya yang akan ditempuh guna untuk regulasi pelayanan perizinan adalah:

- 1) Kajian Peraturan perundang-undangan di bidang investasi dan perijinan.
 - 2) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Penyusunan data investasi di Kabupaten Pematang Jaya sehingga memudahkan dalam kegiatan promosi, pengendalian dan pengawasan terhadap investasi.

Upaya – upaya yang akan ditempuh guna untuk menyusun data investasi adalah:

- 1) Pendataan potensi investasi dan perijinan
- 2) Penyusunan data base investasi dan perijinan
- 3) kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Selain Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana tersebut diatas, maka isu lainnya yang perlu menjadikan perhatian juga adalah dengan adanya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut adanya beberapa indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan Tahun 2017 yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Pelayanan Penanaman Modal.
2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
3. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya pencapaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan pada **“Pengembangan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menuju Pemalang mandiri”**

Guna mencapai tujuan pembangunan daerah Tahun 2020 tersebut, prioritas pembangunan daerah Tahun 2020, meliputi:

1. Optimaslisasi sektor koperasi, usaha kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas, pembinaan;

Memperhatikan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah **Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.**

Adapun guna untuk merealisasikan prioritas tersebut perlu disusun program dan kegiatan untuk mendukungnya, dimana berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun, program dan kegiatannya masih mengacu pada program dan kegiatan tahun berjalan atau tahun 2019.

Tabel II.11
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran seyiap bulan	12 Bulan	909.366,5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran seyiap bulan	12 Bulan	1.233.143,5	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah surat yang tersampaikan dengan baik	4.000 Surat terkirim	85.297,5	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas PMPTSP	Jumlah surat yang tersampaikan dengan baik	4.000 Surat terkirim	109.297,5	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMPTSP	Tersediannya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	120.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMPTSP	Tersediannya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	234.600	
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Tersediannya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	12 Bulan (12 unit)	33.300	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Tersediannya jasa pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	12 Bulan (12 unit)	33.300	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMPTSP	Terpenuhinya kebersihan kantor	12 bulan	56.750	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas PMPTSP	Terpenuhinya kebersihan kantor	12 bulan	86.750	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMPTSP	Prosentase kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	48.140	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas PMPTSP	Prosentase kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	97.920	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMPTSP	Tersediannya blanko-blanko perijinan yang mencangkupi	12 Bulan	37.474	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas PMPTSP	Tersediannya blanko-blanko perijinan yang mencangkupi	12 Bulan	38.806	
7.	Penyediaan komponen instalasi	Dinas PMPTSP	Tersediannya komponen listrik yang memadai	12 Bulan	11.800	Penyediaan komponen instalasi	Dinas PMPTSP	Tersediannya komponen listrik yang memadai	12 Bulan	11.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	listrik/penerangan bangunan kantor					listrik/penerangan bangunan kantor					
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Tersedianya buku bacaan/peraturan perundang-undangan yang memadai	12 Bulan	11.600	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Tersedianya buku bacaan/peraturan perundang-undangan yang memadai	12 Bulan	11.600	
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMPTSP	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	72.745	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMPTSP	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman yang tersedia	12 Bulan	121.850	
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 Kali	270.010	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 Kali	315.510	
11.	Penyediaan jasa keamanan	Dinas PMPTSP	Tersedianya jasa keamanan dengan baik	12 Bulan	111.000	Penyediaan jasa keamanan	Dinas PMPTSP	Tersedianya jasa keamanan dengan baik	12 Bulan	120.000	
12.	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya rapat-rapat koordinaasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	70 Kali	51.250	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya rapat-rapat koordinaasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	70 Kali	51.710	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur		Terpenuhinya Kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 Bulan	554.009,5	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur		Terpenuhinya Kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 Bulan	562.335	
13.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor yang mencukupi	1 Unit	20.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor yang mencukupi	1 Unit	20.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang mencukupi	5 Unit	31.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Tersedianya jumlah peralatan gedung kantor yang mencukupi	5 Unit	40.700	
15.	Pengadaan mebeleur	Dinas PMPTSP	Tersedianya jumlah meubelair	4 Buah	39.990	Pengadaan mebeleur	Dinas PMPTSP	Tersedianya jumlah meubelair	4 Buah	41.500	
16.	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Tercukupinya kebutuhan Komputer/Laptop/Ipad	3 Unit	58.800	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Tercukupinya kebutuhan Komputer/Laptop/Ipad	3 Unit	58.800	
17.	Pemeliharaan rukin/berkala gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 1 Tahun	12 Bulan	45.113,5	Pemeliharaan rukin/berkala gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 1 Tahun	12 Bulan	57.580	
18.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	7 Unit Kendaraan Roda 2 dan 3 Unit Kendaraan Roda 4 (12 Bulan)	131.570	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Dinas PMPTSP	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	7 Unit Kendaraan Roda 2 dan 3 Unit Kendaraan Roda 4 (12 Bulan)	150.000	
19.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	29.125	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	55.375	
20.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantordengan baik setiap bulan	12 Bulan	19.506	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Dinas PMPTSP	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantordengan baik setiap bulan	12 Bulan	50.350	
21.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas PMPTSP	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	2.990	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Dinas PMPTSP	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	2.990	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22.	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Jumlah Komputer dan Perlengkapannya yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	11.750	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Jumlah Komputer dan Perlengkapannya yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	11.750	
23.	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Dinas PMPTSP	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan baik selama 1 Tahun	12 Bulan	5.520	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Dinas PMPTSP	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan baik selama 1 Tahun	12 Bulan	5.520	
24	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Dinas PMPTSP	Softwere dan Sistem Informasi/Aplikasi yang terpelihara dengan baik	1 Kegiatan	158.645	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi	Dinas PMPTSP	Softwere dan Sistem Informasi/Aplikasi yang terpelihara dengan baik	1 Kegiatan	67.370	
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat Kedisiplinan ASN	80 %	27.000	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat Kedisiplinan ASN	100%	26.100	
25.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Tersedianya pakaian dinas harian yang terpenuhi terhadap kebutuhan	60 stel	27.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dinas PMPTSP	Tersedianya pakaian dinas harian yang terpenuhi terhadap kebutuhan	60 stel	26.100	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	85%	286.482	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	100%	256.487	
26.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Tersedianya sarana dan prasarana sosialisasi pelayanan perijinan	4 kegiatan	147.283	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP	Tersedianya sarana dan prasarana sosialisasi pelayanan perijinan	4 kegiatan	135.000	
27.	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi	54 Orang	121.199	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Dinas PMPTSP	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi	54 Orang	121.004	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah Dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	80%	17.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah Dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	100%	29.882	
28.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas PMPTSP	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Buku	17.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dinas PMPTSP	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Buku	29.882	
6.	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Presentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	80%	65.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Presentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100%	66.225	
29.	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas PMPTSP	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	110 Buku	65.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas PMPTSP	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	110 Buku	66.225	
	Penanaman Modal					Penanaman Modal					
7.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah Nilai investasi bersekala nasional (PMDN)	744.604.689.677	654.492	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Jumlah Nilai investasi bersekala nasional (PMDN)	744.604.689.677	718.154,5	
30.	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1 Kali	81.804,5	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	1 Kali	82.178	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Menengah										
31.	Pengembangan potensi unggulan daerah	Dinas PMPTSP	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Kegiatan	130.150	Pengembangan potensi unggulan daerah	Dinas PMPTSP	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 kegiatan	130.150	
32.	Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan pengembangan modal	14 Kegiatan	48.410	Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan pengembangan modal	14 Kegiatan	48.410	
33	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah	12 Bulan	56.482,5	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah	12 Bulan	51.474	
34	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Kali	63.335	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45 Kali	70.550	
35.	Penyelenggaraan pameran investasi	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	3 Kali Pameran	240.790	Penyelenggaraan pameran investasi	Dinas PMPTSP	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	3 Kali Pameran	304.225,5	
36.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas PMPTSP	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan	20 Kali	33.500	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dinas PMPTSP	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan perijinan	20 Kali	31.170	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah investor bersekala nasional (PMDN/PMA)	28 Orang	739.284	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah investor bersekala nasional (PMDN/PMA)	28 Orang	741.284	
37.	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terselesaikannya jumlah permohonan perijinan dengan baik	4.000 izin terbit	625.559	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Terselesaikannya jumlah permohonan perijinan dengan baik	4.000 izin terbit	628.559	
38.	Kajian Kebijakan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Tersusunnya kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan	2 Draft raperda/raperbup	113.725	Kajian Kebijakan penanaman modal	Dinas PMPTSP	Tersusunnya kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan	2 Draft raperda/raperbup	112.725	
9.	Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100%	35.450	Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan		Persentase pengaduan pelayanan perijinan dan investasi yang ditindaklanjuti/ditangani	100%	35.450	
39.	Fasilitas penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Dinas PMPTSP	Prosetase Terfasilitasnya penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	10 Kali	35.450	Fasilitas penyelesaian permasalahan di bidang investasi dan perijinan	Dinas PMPTSP	Prosetase Terfasilitasnya penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	10 kali	35.450	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian .

Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Pemalang hanya mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan terpadu satu pintu. Sehingga pada tahun anggaran 2019 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang tidak mempunyai program dan kegiatan yang menampung usulan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas nasional yang disebut Nawa Cita, memperhatikan Nawa Cita tersebut yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang Jaya untuk tahun 2020 yaitu **“Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”**

Memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2020, prioritas pembangunan terfokus pada upaya penyelesaian isu dan masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, prioritas-prioritas Pembangunan tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan peran UMKM melalui pengembangan akses pasar, kemudahan informasi serta fasilitasi promosi;
- b. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah melalui penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasana pendukung yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif, disertai dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan pengelolaan produk unggulan daerah;
- c. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan bencana;
- d. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak serta peningkatan perluasan pelayanan kesehatan;
- e. Peningkatan pembangunan pertanian dalam arti luas melalui upaya pengembangan budidaya pertanian, peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap serta pengembangan peternakan;
- f. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- g. Peningkatan pariwisata melalui upaya pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan sarana dan prasarana, promosi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia disertai dengan upaya menjaga kelestarian budaya;
- h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Bereferensi pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 jika dikaitkan dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, maka prioritasnya adalah **Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan**

pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Apabila mempertimbangkan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020, maka Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pendukung keberhasilan pelayanan perijinan terpadu satu pintu;
2. Mengupayakan terpenuhinya sumber daya manusia pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang sesuai dengan kompetensinya;
3. Melakukan kajian – kajian terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan perijinan terpadu satu pintu dan pemberian insentif bagi investasi.
4. Melaksanakan sosialisasi kepada para stakeholders terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang perijinan terpadu satu pintu.
5. Melaksanakan pengawasan internal dan pengendalian secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu satu pintu guna meminimalisasi tingkat pengaduan atau complain dari masyarakat
6. Melakukan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait dalam melaksanakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
7. Menyusun data potensi dan data base investasi dan perijinan;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur guna mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Dalam penentuan tujuan dan sasaran Renja SKPD juga tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Rencana Strategik SKPD Tahun 2016-2021, dengan mendasari tujuan dan sasaran tersebut dan dari analisis strategi faktor penentu keberhasilan, maka dapat dirumuskan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perijinan yang baik, dengan sasaran :
 - a) Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang cukup untuk menunjang pelayanan perijinan.
 - b) Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelayanan perijinan.

- c) Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk meningkatkan disiplin aparatur.
 - d) Terpenuhinya peningkatan SDM yang sesuai kompetensinya untuk pelayanan perijinan.
2. Mewujudkan supremasi hukum dibidang pelayanan perijinan guna menjamin adanya kepastian hukum.
 - a) Tersedianya data tentang peraturan perundang-undangan di bidang perijinan.
 - b) Tersusunnya Peraturan daerah di bidang perijinan dan insentif bagi investasi.
 3. Mewujudkan pola informasi dan system pelayanan perijinan yang transparan, dengan sasaran :
 - a) Tersusunnya database tentang potensi pelayanan perijinan.
 - b) Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perijinan terpadu satu pintu.
 - c) Tersedianya sarana informasi/ sosialisasi tentang pelayanan perijinan.
 4. Menciptakan pelayanan perijinan yang mendukung peluang investasi dalam mendukung daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Tersedianya prosedur pelayanan perijinan yang cepat dan tepat
 - b) Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
 5. Menurunnya tingkat pengaduan dibidang pelayanan perijinan, dengan sasaran:
 - a) Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kepada dunia usaha guna meminimalisasi pengaduan dan komplain masyarakat.
 - b) terselesaikannya pengaduan perijinan yang mufakat melalui musyawarah.
 - c) Terlaksananya monitoring dan evaluasi perijinan.
 6. Menyelenggarakan tertib administrasi ketatausahaan, keuangan dan pengelolaan rumah tangga guna mendukung pelayanan perijinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti, dengan sasaran :
 - a) Tercukupinya administrasi perkantoran yang menunjang pelayanan perijinan.
 - b) Tercukupinya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan perijinan.

- c) Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD.
- d) Terselenggaranya koordinasi di dalam dan ke luar daerah dengan baik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD Tahun 2016 -2021 yang bereferensi pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan SKPD yang menjadi bidang tugasnya.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 diharapkan dapat mengakomodir aspirasi masyarakat serta mempunyai tolok ukur guna pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021.

Sedangkan kedudukan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang harus selaras dengan sasaran dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020. Dimana rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang dalam RKPD Tahun 2020 yaitu mengampu **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Penanaman Modal :**

1. Prioritas : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Mendukung Pelayanan Publik., melalui program yang dikembangkan adalah :
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program peningkatan disiplin aparatur;
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
 - 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

- 6) Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD;
 - 7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 8) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 - 9) Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan
2. Prioritas : Pengembangan Aktivitas Ekonomi Masyarakat dan Investasi Daerah dalam rangka Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengurangan Penduduk Miskin., sedangkan program yang dikembangkan adalah :
- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
 - 3) Program Penanganan Pengaduan di bidang Investasi dan Perijinan;

Dari kedua prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 tersebut diatas, maka rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang adalah :

- a. Pelayanan administrasi perkantoran, kegiatannya meliputi :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 5) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah;
 - 11) Penyediaan jasa keamanan;
 - 12) Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatannya meliputi :
 - 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 2) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 3) Pengadaan meubelair;
 - 4) Pengadaan komputer dan perlengkapannya;

- 5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - 7) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - 8) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - 9) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 - 10) Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya;
 - 11) Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor;
 - 12) Pemeliharaan rutin/berkala softwere dan sistem informasi;
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur :
- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, kegiatannya meliputi :
- 1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD;
- e. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, kegiatannya meliputi :
- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- f. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD, kegiatannya meliputi :
- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
- g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, kegiatannya meliputi:
- 1) Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
 - 2) Pengembangan potensi unggulan daerah
 - 3) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
 - 4) Pengawasan dan Evaluasi kinerja dan aparatur badan Penanaman Modal Daerah
 - 5) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - 6) Penyelenggaraan pameran investasi.
 - 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- h. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, kegiatannya meliputi :

- 1) Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
 - 2) Kajian kebijakan penanaman modal
- i. Program penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan, kegiatannya meliputi :
- 1) Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan di bidang investasi dan perijinan.

Tabel III

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	URUSAN PENANAMAN MODAL				1.494.888.500,00				1.494.888.500,00
1.16.1.20.30.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi		744.604.689.677,00	718.154.500,00			744.604.689.677,00	718.154.500,00
1.16.1.20.30.15.01	Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategi antara usaha besar dan usaha kecil menengah	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	1 Kali	40.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		1 kali	40.000.000,00
1.16.1.20.30.15.02	Pengembangan potensi daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	1 Kegiatan	130.150.000,00	APBD Kab. Pemalang		1 Kegiatan	130.150.000,00
1.16.1.20.30.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terselenggaranya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	15 Kali	48.410.000,00	APBD Kab. Pemalang		15 Kali	48.410.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16.1.20.30.15.07	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur badan penanaman modal daerah	Terselenggaranya pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur penanaman modal daerah	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	51.474.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	51.474.000,00
1.16.1.20.30.15.08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	45 Kali	70.550.000,00	APBD Kab. Pemalang		45 Kali	70.550.000,00
1.16.1.20.30.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran investasi	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	3 kali pameran	304.222.500,00	APBD Kab. Pemalang		3 kali pameran	304.222.500,00
1.16.1.20.30.15.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perijinan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	20 kali	31.170.000,00	APBD Kab. Pemalang		20 Kali	31.170.000,00
1.16.1.20.30.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi dan revitalisasi investasi		28 Orang	741.284.000,00			28 Orang	741.284.000,00
1.16.1.20.30.16.06	Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan	Terselesaikanya jumlah permohonan	Dinas PMPTSP	4.000 Izin Terbit	628.559.000,00	APBD Kab.		4.000 Izin Terbit	628.559.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pelayanan penanaman modal	perijinan dengan baik	Kab. Pemalang			Pemalang			
1.16.1.20.30.16.07	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Tersusunnya kajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	2 Draft Raperda	112.725.000,00	APBD Kab. Pemalang		2 Draft Raperda	112.725.000,00
1.16.1.20.30.18	Program peningkatan potensi investasi dan perijinan	Tersedianya potensi investasi dan perijinan yang meningkat		100%	35.450.000,00			100%	35.450.000,00
1.16.1.20.30.18.01	Fasilitasi penyelesaian permasalahan dibidang investasi dan perijinan	Terfasilitasinya penanganan pengaduan di bidang investasi dan perijinan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	10 Kali	35.450.000,00	APBD Kab. Pemalang		10 Kali	35.450.000,00
II.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN				2.174.172.500,00				2.174.172.500,00
1.20.1.20.30.01.	Program Pelayanan Administrasi	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan		12 bulan	1.233.143.500,00			12 bulan	1.233.143.500,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perkantoran	kinerja terhadap kebutuhan							
1.20.1.20.30.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang tersampaikan dengan baik	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	4.000 surat terkirim	109.297.500,00	APBD Kab. Pematang		4.000 surat terkirim	109.297.500,00
1.20.1.20.30.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik terhadap keseluruhan	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	12 Bulan	234.600.000,00	APBD Kab. Pematang		12 Bulan	234.600.000,00
1.20.1.20.30.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prosentase jumlah kendaraan dinas sebanyak 3 buah kendaraan roda 4, dan 9 buah kendaraan roda 2	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	12 Bulan	33.300.000,00	APBD Kab. Pematang		12 Bulan	33.300.000,00
1.20.1.20.30.01.08	Penyedia jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	12 Bulan	86.750.000,00	APBD Kab. Pematang		12 Bulan	86.750.000,00
1.20.1.20.30.01.10	Penyedia alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai setiap bulan	Dinas PMPTSP Kab. Pematang	12 Bulan	97.920.000,00	APBD Kab. Pematang		12 Bulan	97.920.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.30.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	38.806.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	38.806.000,00
1.20.1.20.30.01.12	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang mencukupi setiap bulan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	11.800.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	11.800.000,00
1.20.1.20.30.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya buku bacaan/peraturan perundang-undangan yang memadai	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	11.600.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	11.600.000,00
1.20.1.20.30.01.17	Penyedia makanan dan minuman	Terpenuhi kebutuhan makanan yang tersedia	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	(12 Bulan)	121.850.000,00	APBD Kab. Pemalang		(12 Bulan)	121.850.000,00
1.20.1.20.30.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi didalam dan keluar daerah	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	40 kali	315.510.00,00	APBD Kab. Pemalang		40 kali	315.510.00,00
1.20.1.20.30.01.19	Penyediaan jasa keamanan	Tersedianya jasa keamanan dengan baik	Dinas PMPTSP	12 bulan	120.000.000,00	APBD Kab.		12 Bulan	120.000.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kab. Pemalang			Pemalang			
1.20.1.20.30.01.20	Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi pendampingan pelaksanaan kegiatan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	70 kali	51.710.000,00	APBD Kab. Pemalang		150 kali	51.710.000,00
1.20.1.20.30.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan		12 bulan	562.335.000,00			12 bulan	562.335.000,00
1.20.1.20.30.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya jumlah perlengkapan gedung kantor yang mencukupi	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	1 unit	20.400.000,00	APBD Kab. Pemalang		1 Unit	20.400.000,00
1.20.1.20.30.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya jumlah peralatan kantor yang mencukupi	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	5 unit	40.700.000,00	APBD Kab. Pemalang		5 unit	40.700.000,00
1.20.1.20.30.02.10	Pengadaan meubelair	Tersedianya jumlah meubelair	Dinas PMPTSP Kab.	4 Buah	41.500.000,00	APBD Kab.		4 Buah	41.500.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemalang			Pemalang			
1.20.1.20.30.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapan	Tercukupinya kebutuhan komputer/laptop/lpad	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	3 Unit	58.800.000,00	APBD Kab. Pemalang		3 Unit	58.800.000,00
1.20.1.20.30.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara selama 1 tahun	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	57.580.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	57.580.000,00
1.20.1.20.30.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	11 Unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4 (12 Bulan)	150.000.000,00	APBD Kab. Pemalang		11 Unit kendaraan roda 2 dan 6 unit kendaraan roda 4 (12 Bulan)	150.000.000,00
1.20.1.20.30.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapn gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	4 Jenis (12 Bulan)	55.375.000,00	APBD Kab. Pemalang		4 jenis (12 Bulan)	55.375.000,00
1.20.1.20.30.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik setiap bulan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	50.350.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	50.350.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.20.1.20.30.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang terpelihara dengan baik	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan (3 jenis)	2.990.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan (3 jenis)	2.990.000,00
1.20.1.20.30.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpelihara dengan baik	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan (4 jenis)	11.750.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan (4 jenis)	11.750.000,00
1.20.1.20.30.02.37	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Terpeliharanya pagar dan pembatas lingkungan kantor dengan baik selama 1 Tahun	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	12 Bulan	5.520.000,00	APBD Kab. Pemalang		12 Bulan	5.520.000,00
1.20.1.20.30.02.45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Software dan sistem informasi/aplikasi yang terpelihara dengan baik	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	1 Kegiatan	67.370.000,00	APBD Kab. Pemalang		1 Kegiatan	67.370.000,00
1.20.1.20.30.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur		100%	26.100.000,00			100%	26.100.000,00
1.20.1.20.30.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta	Tersedianya pakaian dinas harian yang	Dinas PMPTSP	60 Stel	26.100.000,00	APBD Kab.		75 Stel	26.100.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	perlengkapannya	terpenuhi terhadap kebutuhan	Kab. Pemalang			Pemalang			
1.20.1.20.30.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			256.487.000,00				256.487.000,00
1.20.1.20.30.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya sarana dan prasarana sosialisasi pelayanan perijinan	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	2 stasiun radio, 5 kali spanduk, 10 kali iklan surat kabar, 14 kali sosialisasi, 4 banner billboard	135.483.000,00	APBD Kab. Pemalang		2 stasiun radio, 5 kali spanduk, 10 kali iklan surat kabar, 14 kali sosialisasi, 4 banner billboard	135.483.000,00
1.20.1.20.30.05.04	Pelatihan teknis pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan Tupoksi	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	54 Orang	121.004.000,00	APBD Kab. Pemalang		54 Orang	121.004.000,00
1.20.1.20.30.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan tahunan			29.882.000,00				29.882.000,00
1.20.1.20.30.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan	Tersusunnya laporan keuangan akhir	Dinas PMPTSP	20 Buku	29.882.000,00	APBD Kab.		20 buku	29.882.000,00

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Sumber Dana		Target	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	akhir tahun	tahun	Kab. Pemalang			Pemalang			
1.20.1.20.30.09	Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		100%	66.225.000,00			100%	66.225.000,00
1.20.1.20.30.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Dinas PMPTSP Kab. Pemalang	110 Buku	66.225.000,00	APBD Kab. Pemalang		110 buku	66.225.000,00
	JUMLAH				3.669.061.000,00				3.669.061.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Demikian Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu .

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Pemalang, 16 Juli 2019.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang



EKO EDI PRIHARTANTO, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19651104 199403 1 008